

## PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

**Firda Setya Anggeli**  
*firdaanggeli@gmail.com*  
**Andajani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aims to examine the influence of transparency and accountability on Village Fund Management in sub-districts in Sawahan District. This research is quantitative. This research uses primary data obtained from the results of distributing questionnaires which were distributed directly and measured using an ordinal scale. The population is the apparatus in Sawahan District which consists of the regent, secretary, government and public services staff, Welfare and Economy staff, Tranquility staff, Order and Development staff, and Order and Order staff. Sawahan District area. Next, the data collection technique is sampling based on predetermined criteria to determine the number of samples studied. The sample in this research consists of 35 respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. Based on the research results, it shows that transparency has no effect on Village Fund Management. On the other hand, accountability has a positive effect on Village Fund Management in the Sawahan District area.*

*Keywords: transparency, accountability, village fund management*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada kelurahan di Kecamatan Sawahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan secara langsung dan diukur dengan skala ordinal. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat-perangkat kelurahan yang berada di Kecamatan Sawahan yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan dan Staff Kelurahan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *puposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk menentukan jumlah sampel yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 35 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di kelurahan Kecamatan Sawahan.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana desa

### PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas politik atas dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah menjadi dasar penggunaan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada partisipasi masyarakat setempat dan aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan

pembangunan. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama dan menjadi masyarakat yang lebih berpotensi. Seorang lurah tidak dapat memimpin suatu kelurahan apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakatnya (Wahongan, 2019).

Menurut Septarini dan Kore (2016:41) dalam pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kebijakan anggaran kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksanakannya otonomi kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan kelurahan dan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Penerapan asas tersebut digunakan untuk menghindari kecurangan yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan desa. Maka pemerintahan, dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan masyarakat. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa harus dikelola dengan aspek tata pemerintahan yang baik. Aspek dari tata pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Dilago *et al.*, (2018) transparansi merupakan suatu indikator penting karena hal tersebut menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Transparansi dapat memberikan akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mencakup informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Pujiati, 2018). Pelaksanaan transparansi ini diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Mustofa (2012:2) menyatakan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang efektif, perlu adanya penyampaian informasi yang mudah untuk dipahami. Pemerintah tidak hanya membuat dan menjalankan program yang memiliki nilai ekonomi tetapi yang utama adalah mengidentifikasi apakah program dan kebijakan sudah sesuai dengan keinginan publik serta tidak membatasi ruang gerak masyarakat agar dapat berkreasi secara produktif.

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Surabaya. Dalam pemilihan kelurahan yang berada di Kecamatan Sawahan sebagai objek penelitian, karena penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak terlihat jelas kemana dan untuk apa saja dana desa tersebut digunakan. Dana yang dikelola pemerintahan kelurahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya masyarakat harus mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa saja dan proses didalamnya (Ngakil dan Kaukab, 2020). Dengan adanya peraturan pengelolaan keuangan desa diharapkan kelurahan yang berada di Kecamatan Sawahan dapat mengelola keuangannya secara terbuka dan dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawahan, (2) Untuk memperoleh

bukti empiris pengaruh dari akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawahan.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Pada teori ini, *steward* menjelaskan dan menggambarkan setiap manusia mempunyai sifat bertanggungjawab, mampu dipercaya, memiliki integritas tinggi dan memiliki tingkat kejujuran yang dimana sifat-sifat tersebut mereka lakukan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri namun untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Dalam sektor pemerintah, *steward* sebagai manajemen dapat diartikan sebagai pemerintahan kelurahan dan *principal* dapat diartikan sebagai rakyat. Peran pemerintahan kelurahan sebagai salah satu lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan tepat waktu). Pemerintahan kelurahan dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### Transparansi

Transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan dana desa yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi memberikan keterbukaan dalam membuat kebijakan anggaran yang dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan dari tahap perencanaan sampai penganggaran. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional. Pemerintahan perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui papan pengumuman, media elektronik serta aparat pemerintah setempat. Maka akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi dan lama waktu.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang secara berkala. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk dijalankan oleh pemerintahan terutama dalam mengelola keuangan desa, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dana akan benar-benar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana kelurahan. Adanya akuntabilitas diharapkan dapat memberikan mutu dan kinerja dari lembaga pemerintahan supaya menjadi pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada kepentingan publik dan hendak mengatakan seluruh wujud penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan dana desa maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintahan. Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertikal accountability*) yaitu pelaporan kepada

atasan misalnya unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

### **Kelurahan**

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah pimpinan oleh lurah dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

### **Dana Desa**

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang maju, kelurahan membutuhkan dana atau anggaran yaitu dana desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditunjukkan bagi desa/kelurahan, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Hulu *et al.* (2018:147) menyatakan bahwa tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pemerintah pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur kelurahan tetapi juga diperuntukkan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses dalam mengatur keuangan dana desa yang dianggarkan pemerintah diawali dari menyusun data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban demi tercapainya tujuan bersama (Masruhin dan Kaukab, 2019). Aspek yang harus dimiliki oleh aparat kelurahan adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Dengan pengelolaan dana desa yang baik akan membawa dampak terhadap perkembangan daerah maupun kota yang juga akan baik. Semakin majunya teknologi maka pengetahuan masyarakat semakin berkembang, yang menuntut adanya pertanggungjawaban aparat kelurahan terhadap dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa seluruh rangkaian kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi merupakan keterbukaan tentang segala informasi kepada masyarakat, serta jika masyarakat memerlukan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah maka masyarakat akan mudah mendapatkan informasi tersebut. Transparansi yang dimaksud adalah kebijakan terbuka bagi pengawasan serta kebijakan atas informasi. Dimana informasi dapat dijangkau oleh publik atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Umami dan Nurodin (2017) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

H<sub>1</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana untuk digunakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas atau kinerja yang telah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin baik dan tingginya akuntabilitas maka semakin baik pula pengelolaan dana desa.

H<sub>2</sub>: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian kasual komparatif (*casual comparative research*). Penelitian kasual komparatif (*casual comparative research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa transparansi dan akuntabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat-perangkat kelurahan yang berada pada Kecamatan Sawahan.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan yang ada di Kecamatan Sawahan yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan dan Staff Kelurahan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner yang akan diberikan kepada perangkat kelurahan yang ada di Kecamatan Sawahan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan secara personal. Jawaban responden merupakan sebuah pilihan dari lima alternative yang mengacu pada *skala likert*.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel dan definisi operasional variabel dapat diartikan sebagai objek penelitian yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian yang memiliki nilai dan variasi yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa.

### **Transparansi**

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan akses yang untuk

memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penelitian ini, meliputi: (1) Hak masyarakat memperoleh informasi pengelolaan dana desa, (2) Keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara administratif maupun teknik yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas memiliki peranan penting sebagai penunjang penerapan otonomi daerah supaya dapat berjalan dengan lebih baik. Variabel independen Akuntabilitas memiliki indikator sebagai berikut: (1) Perencanaan pengelolaan dana desa, (2) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa, (3) Pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana desa.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Penerapan asas tersebut digunakan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan dana desa. Variabel dependen pengelolaan dana desa memiliki indikator sebagai berikut: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban.

### **Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui penilaian dari tanggapan responden di lapangan atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian dan kemudian data tersebut diolah dengan dikelompokkan serta ditabulasikan lalu kemudian dijelaskan. Penilaian dapat diketahui berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dalam setiap pernyataan dari kuesioner.

### **Uji Kualitas Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Untuk menghasilkan kuesioner yang akurat, dapat dipercaya dan diandalkan maka, uji yang digunakan untuk memeriksa kualitas data dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat sebelum melakukan analisis lebih lanjut yaitu analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dimanfaatkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi dari regresi linier berganda yang digunakan. Dalam uji asumsi klasi terdapat 3 macam yang digunakan dalam penelitian yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PDD = \alpha + \beta_1 T1 + \beta_2 A2 + e$$

**Keterangan:**

PDD : Pengelolaan Dana Desa

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1\beta_2$  : Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas

T1 : Transparansi

A2 : Akuntabilitas

e : *Eror*

**Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi dapat mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berganda adalah 0 dan 1. Jika R adalah 0 maka memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika nilai mendekati nilai 1 dan menjauhi nilai 0 memiliki arti bahwa variabel independen memiliki kemampuan untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan Adjusted R<sup>2</sup> karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi tersebut.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji kelayakan model merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 jika nilai  $F < 0,05$  maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan dinyatakan layak, namun jika nilai signifikansi  $F > 0,05$  maka dapat dikatakan seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dan model dinyatakan tidak layak.

**Uji Statistik (Uji t)**

Uji statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa besar suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam uji statistik atau uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Ghozali (2016) menyatakan ada beberapa kriteria pengujian yaitu: (1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dinyatakan hipotesis diterima dan memiliki pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dinyatakan hipotesis ditolak dan tidak memiliki pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Kualitas Data**

**Uji Validitas**

Uji validitas merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan. Berikut ini adalah uji validitas:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	Rhitung	rtabel ( $\alpha = 0.05$ )	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0,751	0,333	Valid
	X1.2	0,676	0,333	Valid
	X1.3	0,905	0,333	Valid
	X1.4	0,826	0,333	Valid
	X1.5	0,741	0,333	Valid
	X1.6	0,716	0,333	Valid

Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,777	0,333	Valid
	X2.2	0,587	0,333	Valid
	X2.3	0,776	0,333	Valid
	X2.4	0,781	0,333	Valid
	X2.5	0,873	0,333	Valid
	X2.6	0,867	0,333	Valid
Pengelolaan Dana Desa(Y)	Y.1	0,924	0,333	Valid
	Y.2	0,882	0,333	Valid
	Y.3	0,926	0,333	Valid
	Y.4	0,857	0,333	Valid
	Y.5	0,886	0,333	Valid
	Y.6	0,928	0,333	Valid

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1, dalam  $r_{\text{tabel}}$  untuk populasi dalam penelitian ini tingkat signifikansi sebesar 5%. Untuk menguji signifikansi dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel nilai derajat bebas/ *degree of freedom* (df)  $n=2$ , dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 35 responden maka  $df = 33$  dan nilai  $r_{\text{tabel}}$  adalah 0,333. Dari hasil uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel dikatakan valid karena  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  atau lebih besar dari 0,333.

### Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2) dan pengelolaan dana desa (Y) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Transparansi (X1)	0,854	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,861	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,941	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner atas jawaban dari setiap variabel yang apabila digunakan berbeda maka tetap sama dan konsisten jawabannya. Dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  dan dikatakan tidak reliabel jika *Cronbach Alpha*  $< 0,60$ . Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, nilai *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel karena di atas 0,60.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi antara variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dinyatakan berdistribusi tidak normal. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

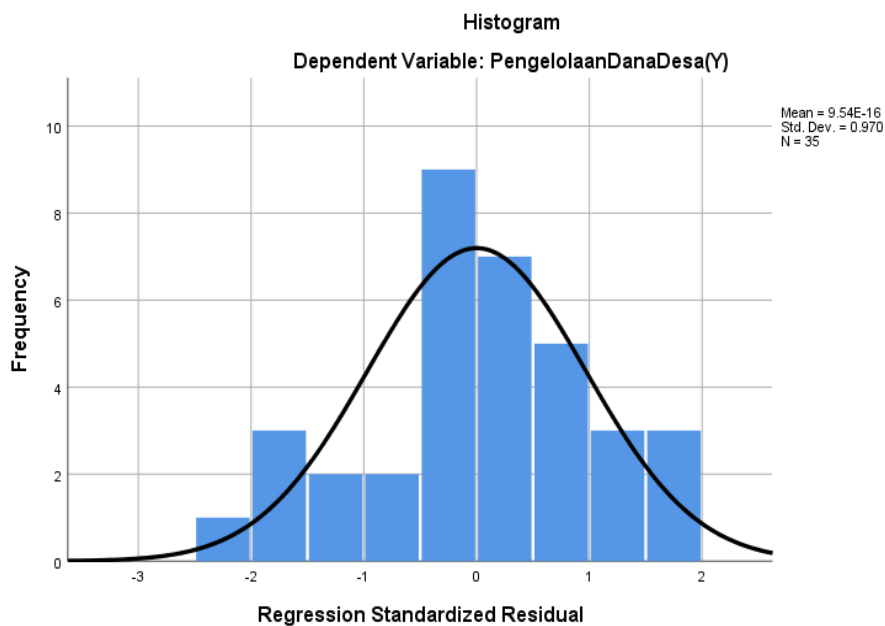


**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

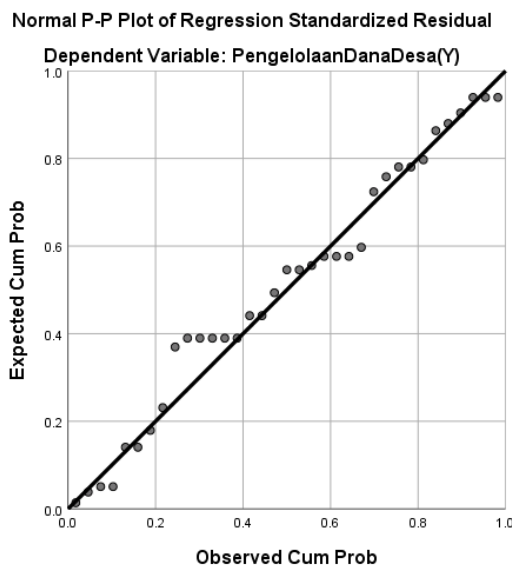
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.07567366
Most extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.086
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini menunjukkan data berdistribusi normal dengan hasil 0,94 atau hasil menunjukkan bahwa melebihi kriteria dari uji *Kolmogorov-smirnov* sebesar 0,094 > 0,05. Hal tersebut dapat digambarkan pada diagram plot sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Grafik Histogram**  
 Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023



**Gambar 3**  
**Plot of Regression Standardized Residual**  
**Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023**

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Titik-titik yang berada di sekitar garis merupakan keadaan data. Data pada grafik histogram dan p-plot di atas terdistribusi dengan normal karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas, maka dengan cara *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Berikut hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Costant)		
Transparansi (X1)	.586	1.706
Akuntabilitas (X2)	.586	1.706

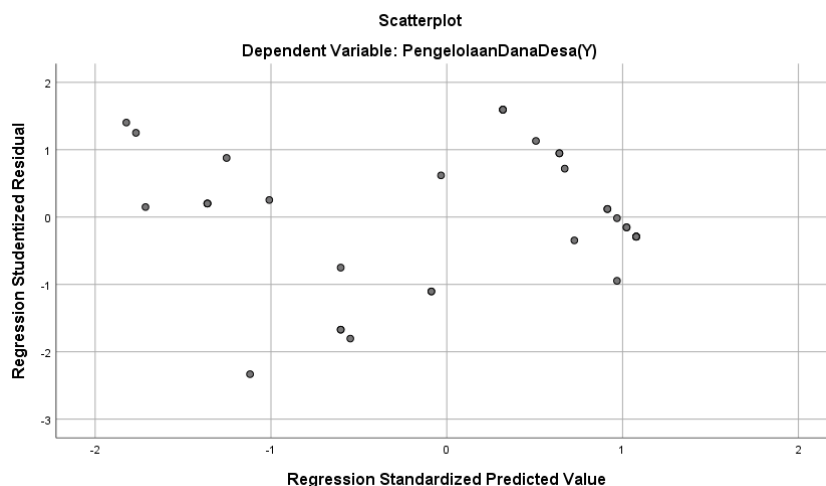
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada indikator transparansi memiliki hasil *tolerance* 0,586 dan VIF 1,706 sedangkan variabel akuntabilitas memiliki hasil *tolerance* 0,586 dan VIF 1,706 yang berarti nilai toleransi pada masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dikatakan lulus uji multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi dalam satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:



**Gambar 4**  
Scatterplot regression Standardized Predicted Value  
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan dependen dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil regresi linier berganda:

**Tabel 5**  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Costant)	-2.310	2.168		-1.065	.295
Transparansi (T)	.146	.090	.140	1.620	.115
Akuntabilitas (A)	.941	0.97	.832	9.564	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)  
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 5, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PDD = \alpha + \beta_1 T_1 + \beta_2 A_2 + e$$

$$PDD = -2.310 + 0,146T + 0,941A + e$$

Pada rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta ( $\alpha$ ) bertanda negatif sebesar -2.310 yang artinya jika variabel independen transparansi dan akuntabilitas sama dengan nol, maka variabel dependen memiliki tingkat pengelolaan dana desa bernilai negatif. Nilai koefisien regresi transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebesar 0,146 bernilai positif yang berarti bahwa transparansi mempunyai hubungan positif terhadap

pengelolaan dana desa. Jika ada peningkatan transparansi maka akan meningkatkan juga pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Nilai koefisien regresi akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa sebesar 0,941 yang berarti bahwa akuntabilitas memiliki hubungan positif terhadap pengelolaan dana desa. Jika terjadi peningkatan pada akuntabilitas maka akan meningkatkan juga pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) memiliki tujuan untuk mengukur presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam satuan persen pada sebuah model regresi penelitian. Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.928a	.861	.852	1.109

a. Predictors: (Contant), Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 18 dapat diketahui bahwa pada *Adjusted R Square* diperoleh nilai 0,852. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel independen transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap variabel dependen pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,852 atau 85,2% dan sisanya sebesar 14,8% pada variabel pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi dalam penelitian ini.

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $F < 0,05$  maka model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam penelitian. Dan apabila nilai signifikansi  $F > 0,05$  maka model regresi dinyatakan tidak layak untuk digunakan dalam penelitian. Berikut ini hasil uji kelayakan model:

Tabel 7  
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)  
ANOVA

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	243.231	2	121.615	98.923	.000b
Residual	39.341	32	1.229		
Total	282.571	34			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Costant), Transparansi (X1), Akuntabilitas(X2)

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil uji F dalam penelitian ini, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai signifikan yang diperoleh  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian.

### Uji Statistik (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 8  
Hasil Uji Statistik (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	-2.310	2.168		-1.065	.295
Transparansi (X1)	.146	.090	.140	1.620	.115
Akuntabilitas (X2)	.941	0.97	.832	9.564	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat diketahui masing-masing variabel sebagai berikut: Hasil pengujian uji t menunjukkan variabel transparansi nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,620 dengan nilai signifikansi sebesar 0,115. Nilai signifikansi pada variabel transparansi  $> 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,146 yang menunjukkan arah positif maka dapat diartikan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak atau tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil pengujian uji t menunjukkan variabel akuntabilitas nilai  $t_{hitung}$  sebesar 9,564 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas  $< 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,941 yang menunjukkan arah positif maka dapat diartikan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) dapat diterima atau berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### Pembahasan

#### Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sawahan

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, pada variabel transparansi dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa. Hal tersebut berdasarkan pada hasil nilai signifikansi transparansi sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa tidak dapat diterima atau ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya jawaban responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju menandakan bahwa transparan atau tidak, pengelolaan dana desa akan tetap berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang digunakan untuk sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam akses informasi masih sulit untuk dilakukan dan keberadaan musyawarah pembangunan yang tidak dihadiri masyarakat melainkan hanya perwakilan masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan. Namun, pemerintahan kelurahan harus mengikuti peraturan dan prosedur yang telah diupayakan karena telah menjadi dasar hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Wardani dan Utami (2020) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pemerintah menjalankan tindakan transparansi berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sawahan

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, pada variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa. Hal tersebut berdasarkan pada hasil nilai signifikansi akuntabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis

kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa yang artinya semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pula pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintahan kelurahan mempunyai tugas untuk mengurus dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, karena pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju yang berarti bahwa dalam pengelolaan dana desa telah mempertimbangkan kepentingan pembangunan yang lebih dibutuhkan agar penggunaan dana desa dapat dirasakan manfaatnya dan dalam pengelolaan dana desa, telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta program kegiatan yang dijalankan mampu dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas dengan melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil dari penelitian mengenai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan pada peraturan pemerintah sehingga pengelolaan dana desa akan tetap dilakukan dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang telah diupayakan karena telah menjadi dasar hukum yang berlaku, (2) Hasil penelitian ini akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan pengelolaan dana desa telah mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dalam laporan keuangan secara rinci serta telah memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembangunan desa.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menyebarkan kuesioner, beberapa lurah belum mengetahui kondisi yang terjadi pada kelurahannya dikarenakan pada saat penyebaran telah terjadi pergantian lurah serta beberapa perangkat kelurahan tidak dapat memberikan jawaban pada saat menyebarkan kuesioner dikarenakan ada kegiatan dari pemerintah pusat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti memiliki beberapa saran bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini: (1) Bagi Pemerintahan desa sebaiknya dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, (2) Bagi masyarakat perlu membangun kesadaran dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahannya, (3) Bagi Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dan menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dilago, R., J. Lumolos, dan W. Waworundeng. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1-8.
- Hulu, Y., R. H. Harahap, dan M. A. Nasution. 2018. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1): 146-154.
- Masruhin, A dan M. E. Kaukab. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal Of Economic, Business and Enginerring* 1(1): 118-130.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal* 1(1): 1-6.
- Ngakil, I dan M. E. Kaukab. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 3(2): 92-107.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Jakarta.
- Pujiati, L. 2018. Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 1(1): 25-34.
- Putra, I. M. Y. D., N. K. Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi* 28(1): 132-158.
- Septarini, D. F. dan E. L. R. Kore. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial* 7(1): 40-60.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Umami, R. dan I. Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 6(11): 74-80.
- Wahongan, S. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Bagi Pembangunan. *Jurnal Ilmu Politik* 8(1): 1-10.
- Wardani, D. K. dan R. R. P. Utami. 2020. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis* 28(01): 35-50.